



Check for updates

Demokratisasi di tingkat lokal: NU dan Muhammadiyah dalam Pilpres 2024 di Kota Salatiga

Imam Sumantri Ms^{1*}, Evany Sofia Prameswari¹, Agustinus Sugeng Priyanto²

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, 50229, Jawa Tengah- Indonesia

²Program Studi PPKn, Universitas Negeri Semarang, 50229, Jawa Tengah- Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Nov 18, 2024

Diterima: Des 30, 2024

Dipublikasi: Jan 31, 2025

KATA KUNCI:

Democracy; Electoral; Local; Muhammadiyah; NU.

KORESPONDEN:

Imam Sumantri Ms

Program Studi Ilmu Politik,
Universitas Negeri Semarang.

Email:

imamsumantri@mail.unnes.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Sumantri, I., Prameswari, E. S., & Priyanto, A. S. (2025). Demokratisasi di tingkat lokal: NU dan Muhammadiyah dalam Pilpres 2024 di Kota Salatiga. *Journal of Political Issues*, 6 (2); 135-145. <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.302>

DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.302>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This research examines the phenomenon of democratization at the local level. The political celebration in 2024 is an interesting momentum to see how the dynamics of democratization at the local level. Democracy is a post-reform common spirit that needs to be guarded and improved by various parties, including civil society organizations such as NU and Muhammadiyah. This research aims to obtain an overview and analysis of how the role and existence of NU and Muhammadiyah in contributing to maintaining the quality of community-oriented democracy, especially at the local level. This research uses a descriptive qualitative approach with interview techniques by interviewing several informants and literature and data analysis techniques to analyze the electoral dynamics of NU and Muhammadiyah. The results of research on the role of NU and Muhammadiyah in the contestation of the 2024 presidential election show that political contestation cannot be separated from the influence of NU and Muhammadiyah. The modalities owned by the two largest Islamic organizations in Indonesia still provide a real influence in the electoral process and have implications for the existence of mass organizations. The close affiliation with political parties, especially between Muhammadiyah and the National Mandate Party in Salatiga, also creates strong political relations electorally. Likewise, NU, which has elite-directed solidarity, also increases its existence in the face of political contestation.

Abstrak Penelitian ini mengkaji fenomena demokratisasi di tingkat lokal. Hajatan elektoral di tahun 2024 menjadi momentum yang menarik untuk melihat bagaimana demokratisasi di tingkat lokal dan dinamikanya. Demokrasi merupakan agenda dan tuntutan reformasi yang perlu dikawal dan ditingkatkan oleh berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan analisis tentang bagaimana peran dan eksistensi NU dan Muhammadiyah dalam berkontribusi menjaga kualitas demokrasi yang berorientasi pada masyarakat, khususnya di tingkat lokal. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik wawancara dengan mewawancarai beberapa informan serta literatur dan Teknik analisis data untuk menganalisis dinamika NU dan Muhammadiyah di Tingkat lokal. Hasil penelitian tentang peran NU dan Muhammadiyah dalam kontestasi Pilpres 2024 menunjukkan bahwa kontestasi politik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh NU dan Muhammadiyah. Modalitas yang dimiliki oleh kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini masih memberikan pengaruh yang nyata dalam proses elektoral dan memiliki implikasi pada eksistensi ormas. Afiliasi dengan partai politik yang sangat dekat, terutama antara Muhammadiyah dan Partai Amanat Nasional di Salatiga, juga menciptakan relasi politik yang kuat secara elektoral. Demikian juga dengan NU yang memiliki solidaritas yang diarahkan oleh elite, juga meningkatkan eksistensinya dalam menghadapi kontestasi politik.

TENTANG PENULIS:

Imam Sumantri Ms, Penulis menyelesaikan studi S-2 dengan konsentrasi HAM dan Demokrasi di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018, saat ini penulis sedang menjadi staff pengajar di Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Negeri Semarang. Email: imamsumantri@mail.unnes.ac.id

Evany Sofia Prameswari, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020, saat ini

penulis sedang menjadi staff pengajar di Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Negeri Semarang. Email: evanysofia@mail.unnes.ac.id.

Agustinus Sugeng Priyanto, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Sosiologi Agama di Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1999 dan studi S-3 di Program Doktorat Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, saat ini penulis sedang menjadi staff pengajar di Program Studi PPKn FISIP Universitas Negeri Semarang. Email: atsugeng@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Kajian ini akan mengelaborasi dinamika organisasi tertua dan terbesar seperti NU dan Muhammadiyah dalam konteks politik lokal. Peranan kedua ormas tersebut dalam proses demokratisasi di Indonesia baik dalam wacana maupun praksis sangat signifikan. Keterlibatan keduanya setidaknya dapat dijelaskan karena secara sosiologis mereka memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam masyarakat dan hal tersebut menjadi faktor pembeda jika dibandingkan dengan proses demokratisasi di Negara lain. Secara historis, keduanya terlibat dalam dinamika politik kenegaraan dan mewarnai setiap periode penting dalam sejarah Indonesia. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta pada tahun 1912, kemudian mengadopsi pola organisasi sekuler dengan menjadikan pelayanan sosial sebagai konsentrasi gerakannya. Hal inilah yang menjadikan organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan menjadi kelompok kepentingan yang efektif pada masa pendudukan Belanda untuk mendorong perbaikan kehidupan masyarakat pribumi (Alfian, 1989).

Berbeda dengan Muhammadiyah, NU didirikan oleh sekelompok ulama yang berbasis pesantren tradisional di Jawa. Para ulama berperan penting dalam menanamkan nasionalisme pada masa merebut kemerdekaan dan menjadi kekuatan politik Islam yang efektif pada masa awal kemerdekaan. Salah satu peran penting yang dilaksanakan dengan menjadi partai politik pada orde lama dan akhirnya dipaksa berfusi dengan partai Islam lain sampai pertengahan 1980-an. Setelah itu, dalam menghadapi Orde Baru yang represif, NU memutuskan untuk kembali kepada “*khittah* 1926”, yang dapat ditafsirkan sebagai sebuah strategi yang seolah-olah apolitis, tetapi pada dasarnya membuat NU dapat berinteraksi dengan berbagai macam kekuatan politik untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas (Feillard A, 1999).

NU dan Muhammadiyah memiliki Modalitas sosiologis, historis dan moral-religius yang berimplikasi pada keduanya untuk terlibat dalam “politik-praktis”. Sejak runtuhnya Orde Baru memberikan struktur ruang yang baru bagi figur-figur yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Kemunculan dua figur pemimpin di dua organisasi baik NU dan Muhammadiyah seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Amien Rais, dalam rangka menurunkan Orde Baru menjadi salah satu contoh pengaruh besar dengan masyarakat di awal reformasi. Kedua figur ini juga sama-sama membidani lahirnya dua partai politik yang berbasis massa Islam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengisi ruang demokrasi kepartaian saat itu. Dengan basis massa yang besar NU dan Muhammadiyah memiliki banyak afiliasi dan berimplikasi kepada PKB dan PAN dan semakin membuka ruang kepada kedua organisasi ini terlibat dalam “politik praktis” terutama dalam proses Pemilu. Dalam konteks elektoral itu, posisi NU dan Muhammadiyah dapat terlihat dengan menjadi aktor untuk mobilisasi suara komunitas muslim yang efektif bagi partai politik dan kandidat. Selain itu, penguatan demokrasi dengan diperkenalkannya pemilihan umum ke masyarakat secara langsung sejak tahun 2005 juga “mengundang” secara alamiah kedua organisasi ini untuk terlibat dalam proses kandidasi yang ikut pemilu (Sulistiyanto P, 2009).

Menurut Liddle dan Muzani kuantitas jamaah yang banyak tersebut hanyalah klaim saja tanpa ada bukti yang cukup kuat untuk dapat membuktikan klaim tersebut (Mujani, 2006). Apabila dibandingkan dengan survei yang dilakukan oleh Robin Bush terhadap 1.850 responden di Jawa, terdapat data yang menyatakan bahwa mereka yang menyatakan berafiliasi

dengan ormas Islam (mendekati 70%), 49% di antaranya menyatakan diri berafiliasi kepada NU dan hanya 7,9% yang menyatakan afiliasinya kepada Muhammadiyah (Bush et al., 2014).

Sejauh ini, kualitas demokrasi Indonesia masih dalam tataran demokrasi yang menjalankan demokrasi prosedural. Meskipun dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi tidak cukup dengan cara prosedural saja seperti pemilu, tetapi perlu penyeimbang antara prosedural yang juga sangat penting dengan hal yang sifatnya esensial. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah, tentang IDI atau indeks demokrasi Indonesia di Jawa Tengah mengalami fluktuatif sejak tahun 2018. Tercatat pada tahun 2018 berada pada angka 72,12, tahun 2019 berada pada angka 77,22 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 yakni 75,43. Pada posisi inilah, NU dan Muhammadiyah mendapatkan ruang untuk menyediakan mesin yang efektif dalam memberdayakan, menggalang, mengorganisir dalam level tertentu dan memobilisasi masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi.

NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia akan sangat diperhitungkan dalam eskalasi politik nasional. Tulisan yang membahas mengenai ormas keagamaan terbesar seperti NU dan Muhammadiyah tentu sudah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dari berbagai macam perspektif, baik dari perspektif behavioralis mengenai perilaku aktor ormas keagamaan yaitu kiai dalam keterlibatannya di dunia politik dan kaitannya dengan partisipasi, strategi dan keterlibatannya dalam pemilihan umum (Subiyakto, 2011). Selain itu juga posisi Kiai dan tokoh ormas keagamaan menjadi “laris manis” pada setiap hajatan elektoral karena menjadi sasaran politisi untuk membangun basis massa. Kemudian dari perspektif sosiologi politik misalnya, melihat pengaruh yang signifikan pada perilaku elite politik akibat terjadinya dinamika politik dan perubahan konstelasi politik secara menyeluruh (Jurdi S, 2011b). Penelitian lainnya mengenai ormas keagamaan juga cenderung menitikberatkan pada perspektif elitis, dengan melihat modal pada pemimpin-pemimpin ormas keagamaan tersebut (Efendi D, 2004).

Pada level lokal, kedekatan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan sebagai aktor *intermediary* dengan partai politik dalam menjadi sebuah keniscayaan. NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia terbukti ikut memberi warna pada proses demokratisasi (Thontowi, 2008). Setiap gerakan dari ormas keagamaan ini memiliki strategi untuk *survive* dengan caranya masing-masing, seperti menggunakan pendekatan yang murni secara kultural maupun melakukan afiliasi terhadap kekuasaan politik. Namun pada kenyataannya, ormas lebih sering menggunakan wilayah kultural saja tanpa menyentuh struktur politik menjadi suatu hal yang tidak cukup (Jurdi S, 2004a). Melalui sejumlah penelitian lain mengkaji tentang NU dan Muhammadiyah yang kemudian menjadikan orientasi NU dan Muhammadiyah bersifat seimbang satu dengan yang lain yaitu, antara perhatian pada wilayah struktur Negara dan kultur masyarakat. Penelitian lain juga banyak menggunakan pendekatan lainnya seperti pendekatan secara kultural, perilaku elite hingga aktor. Sehingga sangat menarik untuk mengetahui dari perspektif institusional NU dan Muhammadiyah di level lokal. Bagaimana sebenarnya peran NU dan Muhammadiyah sebagai institusi dalam demokratisasi lokal di tahun elektoral. Bagaimana NU dan Muhammadiyah mempertahankan eksistensinya dalam pemilu khususnya pilpres 2024. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting dalam menjelaskan dinamika demokrasi di tingkat lokal.

LANDASAN TEORITIK

NU dan Muhammadiyah sebagai aktor *intermediary* atau aktor perantara dalam sebuah arena demokrasi prosedural memainkan peran yang cukup signifikan. Pola relasi kedua organisasi sebagai *intermediary actor* diimplementasikan dalam sebuah relasi antara Negara, *intermediary*, masyarakat, dan partai politik. *Pertama*, hubungan tersebut antara pemerintah dan para pemimpin organisasi terkait kepentingan pengikut organisasi dan masyarakat. *Kedua*, pola

komunikasi yang dilakukan organisasi perantara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada partai politik, sehingga partai politik akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada negara/pemerintah (Asyari S, 2009).

Meningkatnya tuntutan demokratisasi merupakan tujuan utama untuk dapat mencapai kehidupan sosial politik dan ekonomi yang lebih ideal. Demokrasi digunakan sebagai retorika politik untuk memperoleh legitimasi, salah satunya melalui pemilihan umum. Fenomena keterlibatan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam sebuah hajatan elektoral merupakan fenomena yang lumrah terjadi. Kontestasi politik elektoral menjadi sarana untuk menguji eksistensi NU dan Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan yang memiliki orientasi pada pemberdayaan umat dan bukan berorientasi pada kekuasaan. Memaknai kerangka modalitas seperti yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, maka modal diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki individu/kelas untuk dapat mendominasi individu/kelas lain.

Dalam pandangan Bourdieu salah satu hal yang terpenting adalah tentang lahirnya tindakan aktor dengan adanya modal. Modal dalam pandangan Bourdieu diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki individu atau kelas untuk dapat mendominasi individu atau kelas lain. Bourdieu membagi modal dalam empat bentuk yaitu modal sosial, modal ekonomi, modal budaya dan semuanya dapat dipertukarkan dengan modal simbolik. Selain itu, tak kalah penting dari konsep Bourdieu selanjutnya adalah arena yang berarti "medan perjuangan" individu, "suatu jaringan, atau konfigurasi" untuk mendapatkan pengakuan.

Dalam pandangan Bourdieu, menguasai arena kekuasaan (politik) merupakan cara yang paling efektif, sebab dengan menguasai arena politik ini individu/kelas dapat menguasai arena lain. Dalam pandangan ekonomis Bourdieu, arena menjadi benar-benar dikendalikan oleh hubungan antara penawaran dan permintaan atau *bargaining*. Ini memungkinkan terjadinya penggunaan istilah semacam 'harga' dan 'biaya' dalam hubungannya dengan strategi aktor dalam arena (Jenkins R, 2004).

Selain modal dan arena, masih terdapat konsep tentang habitus. Habitus merupakan struktur mental atau kognitif yang digunakan oleh individu untuk menghadapi kehidupan sosial. Individu dibekali dengan serangkaian skema dan pola yang dengannya ia merasakan, memahami, menyadari, menilai dan mengevaluasi dunia sosial, masyarakat dan orang lain, bahkan habitus membentuk gaya hidup individu atau kelas (Ritzer, 2004).

"Habitus, merupakan produk historis, yang menciptakan tindakan individu dan kolektif dan karenanya sesuai dengan pola yang di timbulkan oleh sejarah". Menurut Bourdieu habitus merupakan dialektika internalisasi dari eksternalitas dan internalitas yang pada intinya habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial (Bourdieu P, 1977). Sehingga perubahan habitus berdasarkan kehidupan sosial dan perubahan kehidupan sosial dipengaruhi oleh habitus, sehingga dapat dikatakan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Habitus dihasilkan dari pengalaman individu menempati fungsi dan posisi sosial tertentu dalam struktur objektif sosial. Selain itu, dihasilkan dari periode historis yang panjang, sehingga ia dapat menyesuaikan diri (berubah-ubah) dengan periode historis dimana tindakan itu terjadi. Dengan demikian, senjata yang ampuh dalam memenangkan "perang" di dalam *field*/arena politik adalah penguasaan modal dan tentu saja habitus. Sehingga, praktik politik yang dibentuk oleh modal dan habitus dalam sebuah *field*/arena atau dalam rumusan matematis Bourdieu [(Habitus x Modal)] + Ranah = Praktik (Bourdieu P. A, 1984).

Dengan ini akan terlihat bagaimana tindakan-tindakan politik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang hari ini dipengaruhi oleh faktor sejarah mereka. NU dan Muhammadiyah merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia sehingga sudah sewajarnya menjadi kekuatan umat Islam di Indonesia saat ini. Melihat perkembangan sejarah, NU memiliki perjalanan panjang sebagai sebuah organisasi masa terutama pada perjalanan politiknya dimulai dari anggota MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) hingga menjadi anggota partai Masyumi. Bila melihat faktor tersebut wajar saja ketika NU memiliki kekuatan politik yang hingga saat ini masih diperhitungkan, sehingga *impuls* politik di lingkungan NU tidak pernah mati tetapi

malah berkembang dari waktu ke waktu (Ilyas Y, 1993). Sehingga wajar saja ketika sampai hari ini NU sebagai organisasi masa masih diperhitungkan kekuatan politiknya.

Muhammadiyah pun juga ternyata sama seperti NU yang memiliki perkembangan sejarah yang panjang, begitu juga dengan sejarah perkembangan politiknya. Muhammadiyah dimulai dari keaktifan K.H Ahmad Dahlan dalam Boedi Oetomo (BO) dan Sarekat Islam (SI). Selanjutnya, dalam sejarah perpolitikan nasional dibagi menjadi sembilan masa. *Pertama*, masa kooperatif. *Kedua*, masa kemerdekaan (1940-1950). *Ketiga*, masa fleksibilitas dalam keanggotaan partai politik yang mulai terjadi setelah disepakati adanya parpol bersama bagi umat Islam, yakni partai Islam Masyumi. *Keempat*, masa sektarianisme politik (1952-1956). *Kelima*, masa kembali kepada basis gerakan atau khittah 1912. *Keenam*, masa organisasi masyarakat dan politik 960-an. *Ketujuh*, masa penguatan *khittah* perjuangan yaitu periode 1969-1994. *Kedelapan*, masa oposisi terhadap kekuatan politik Orba. *Kesembilan*, masa ambivalensi dalam politik praktis (Jurdi S, 2004b).

Secara normatif kedua ormas baik NU dan Muhammadiyah memilih jalan di luar politik praktis. Seperti halnya NU dengan *Khittahnya* yang tidak diragukan lagi telah membawa NU pada kedudukan di luar politik praktis yang tidak memungkinkan terlibat dalam politik praktis. Tetapi, NU kini tampak menggunakan model *beyond politics* yang aksentuasinya bukan pada mekanisme formal. Cara yang dipakai untuk mempengaruhi kebijakan publik, lepas dari persoalan efektivitas yaitu sering disebut-sebut oleh Abdurrahman sebagai “negosiasi di balik layar” (Karim A.G, 1995). Sama halnya dengan Muhammadiyah, bahwa kekuasaan adalah sebagai ‘satu- satunya’ sarana merealisasikan cita-cita sosial Muhammadiyah, selain untuk pemenuhan kepentingan politik elite. Cita-cita sosial Muhammadiyah seperti misalnya dalam tiga bidang utama, yaitu bidang agama, bidang pendidikan, dan bidang kemasyarakatan (Sairin W, 1995). Islam di Indonesia telah menunjukkan keberagaman, bukan keseragaman, moderasi, bukan radikalisme. Harapan bahwa organisasi-organisasi Islam akan terus memainkan peran yang beragam dalam mengekspresikan tujuan-tujuan mereka dan membentuk isi dan struktur demokrasi Indonesia yang lebih baik (Jung, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Proses kualitatif melibatkan pengumpulan pandangan atau data yang lebih rinci dari berbagai sumber informasi, serta dilakukan dalam konteks alamiah yang sesuai dengan lingkungan aslinya (Walidin W, 2015). Metode pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan mengumpulkan data dari observasi, wawancara dan artikel yang menunjang penelitian. Wawancara dilakukan kepada pimpinan PDM kota Salatiga dan Pimpinan PCNU kota Salatiga serta jemaah dari kedua organisasi masyarakat tersebut dan berbagai literatur lainnya sebagai data sekunder. Studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan penuh ketelitian dan keintiman untuk menyelidiki secara mendalam terkait dinamika NU dan Muhammadiyah sebagai institusi di level lokal, seperti program, peristiwa, atau aktivitas yang dilakukan dalam tahun hajatan politik dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hal tersebut (Baxter JA, 1998). Persoalan yang akan dikaji dan dianalisis adalah untuk mengetahui bagaimana peran secara institusional NU dan Muhammadiyah dalam hajatan elektoral 2024 dan bagaimana NU dan Muhammadiyah mempertahankan eksistensinya sebagai ormas besar khususnya dalam konteks lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya tuntutan diskursus demokrasi di era saat ini merupakan keinginan untuk mencapai kehidupan sosial politik dan ekonomi yang lebih ideal. Demokrasi digunakan sebagai retorika politik untuk memperoleh legitimasi. Fenomena keterlibatan organisasi

kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam sebuah hajatan elektoral merupakan fenomena yang lumrah terjadi. Konteks politik menjadi sarana untuk menguji eksistensi NU dan Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan dengan orientasi pada pemberdayaan umat bukan berorientasi pada kekuasaan. Memaknai kerangka modalitas seperti yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, maka modal diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki individu/kelas untuk dapat mendominasi individu/kelas lain.

Mengenai pola relasi dari organisasi sosial kemasyarakatan NU dan Muhammadiyah maka penting sekali melihat modal sosial yang dimiliki oleh masing-masing organisasi yang berbasis keagamaan ini. Modalitas NU dan Muhammadiyah digunakan sebagai *bargaining position* dalam sebuah ranah memperjuangkan eksistensi. Secara politis, modalitas yang dimainkan oleh dua ormas keagamaan terbesar NU dan Muhammadiyah dilakukan untuk melacak sumber daya yang melandasi kedua organisasi tersebut dalam menentukan *standing position* dalam kancah perpolitikan Indonesia. Modalitas tersebut akan diidentifikasi sebagai pengetahuan untuk mengetahui basis dalam menentukan sikap.

Pembahasan ini menjadi menarik karena ada fenomena politik yang serentak secara nasional yaitu Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden khususnya dalam konteks lokal di Kota Salatiga. Salatiga merupakan salah satu kota kecil di Jawa Tengah yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Berdasarkan data dari situs pemerintah kota secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan serta memiliki luas wilayah sebesar 5.678 Ha. Kota ini dikenal sebagai kota yang sangat toleran berdasarkan survei setara institut dan memiliki dinamika politik yang cukup unik. Relasi kuasa dan afiliasi antar ormas dan partai politik seperti Muhammadiyah dan partai politik yang lahir dari Muhammadiyah itu sendiri yaitu PAN masih sangat dekat. Jabatan-jabatan strategis baik di pemerintahan maupun di universitas banyak juga yang terafiliasi dekat dengan Muhammadiyah. Demikian juga NU dengan basis kultural yang sangat kuat dengan banyaknya basis pesantren yang cukup besar di Kota Salatiga membuat kedua fenomena tersebut menjadi khas yang tersendiri.

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bagaimana NU dan Muhammadiyah mengambil sikap, menegosiasikan modal-modal sosial, hambatan-hambatan yang ada untuk memikirkan masa depan NU dan Muhammadiyah. Pentingnya melihat modal sosial dan hambatan-hambatan yang dimiliki NU dan Muhammadiyah disebabkan oleh keadaan politik di Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis.

Modal Sosial NU Vs Muhammadiyah

Identifikasi modal sosial dalam ormas NU dan Muhammadiyah terdiri dari basis massa, lembaga-lembaga yang dinaungi dan jaringan dalam birokrasi.

Pertama, basis massa menjadi salah satu modal sosial yang dimiliki oleh NU dan Muhammadiyah. Di Kota Salatiga, komposisi basis massa antara ormas Muhammadiyah dan NU cenderung tidak seimbang, jamaah NU cenderung lebih mayoritas dibandingkan dengan jamaah Muhammadiyah meskipun jumlah anggota keduanya tidak pasti. Keanggotaan tersebut tidak dapat dilacak dengan kartu anggota karena memang pendataannya kurang maksimal. Salah satu cara yang dapat menentukan seseorang termasuk ke dalam ormas NU atau Muhammadiyah adalah dilihat berdasarkan muamalahnya. Porsi basis massa yang termasuk ke dalam ormas NU dan Muhammadiyah di Salatiga sangat beragam. Ada daerah yang NU-nya sangat banyak, ada yang NU di suatu daerah adalah minoritas, namun ada juga yang memilih tidak ikut NU ataupun Muhammadiyah.

Kedua, modal sosial dilihat dari lembaga-lembaga yang dinaungi oleh NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri membawahi organisasi-organisasi lain seperti Aisyiah, PDA dan PDM. Komposisi organisasi yang berada di bawah Muhammadiyah di kota Salatiga ini cukup lengkap sampai pada IMM atau ikatan mahasiswa Muhammadiyah di Salatiga karena terdapat kampus negeri yakni Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam

gerakan organisasi muda Muhammadiyah terdapat berbagai bidang seperti advokasi dan bidang politik yang dalam bergeraknya harus mendapatkan izin dari PDA dan PDM. Selain itu, Muhammadiyah sebagai ormas Islam memiliki gerakan kepemudaan seperti yang diungkapkan ketua pemuda Muhammadiyah kota Salatiga seperti AMM atau angkatan muda Muhammadiyah. Di kota Salatiga AMM pun cukup solid dalam berbagai kegiatannya. Basis massa yang dimiliki AMM menjadi salah satu gerakan yang diperhitungkan dalam kontestasi politik.

Sedangkan komposisi organisasi di bawah naungan NU seperti yang diungkapkan pengurus PCNU di Salatiga ini cukup lengkap yakni mulai dari NU, Muslimat, Anshor dan Fatayat. Komposisi organisasi ini menempati posisi yang cukup penting sebagai posisi tawar yang sangat kuat dalam kontestasi politik. Posisi tawar tersebut hubungannya dengan terpenuhinya kebutuhan dari lembaga-lembaga yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Berbagai organisasi yang berada di bawah naungan NU juga merupakan modal NU sehingga memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam politik elektoral.

Ketiga, dari sisi jaringan birokrasi, adanya relasi antara Muhammadiyah dengan kepala daerah dan birokrasi juga merupakan modal bagi Muhammadiyah sebagai ormas Islam di Salatiga. Hal tersebut menjadikan Muhammadiyah lebih mudah dalam menjalankan program kerja organisasinya. Wakil Kepala daerah yang menang periode 2017-2022 merupakan aktor yang cukup dekat dengan Muhammadiyah yang kebetulan juga adalah wakil kepala daerah 2 periode. Selain itu, rektor Universitas Negeri yang berada di Salatiga juga merupakan kader PP Muhammadiyah. Sebagai ormas yang memiliki afiliasi yang cukup dekat terhadap birokrasi, maka sangat mungkin berbagai pihak melakukan *silaturahmi* politik dengan ormas Muhammadiyah untuk maju dalam kontestasi politik.

Jaringan birokrasi NU dan pemerintahan setempat menunjukkan relasi yang tidak seintim Muhammadiyah, baik di lingkungan pemerintah kota maupun di lingkungan Universitas di Salatiga. Beberapa pejabat kampus negeri di Salatiga juga berasal dari kalangan NU dengan jumlah yang cukup banyak. Secara kuantitas NU memiliki banyak pejabat struktural tetapi tidak di beberapa jabatan strategis. Daya tawar NU yang sangat tinggi tidak lepas dari kuantitas jamaah dan relasi para Kyai dengan otoritas di atasnya seperti pemerintah pusat.

Keempat, Muhammadiyah dalam perjalanannya sebagai ormas Islam yang besar di Indonesia memiliki basis dakwah yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan pendidikan. Pada awalnya Muhammadiyah membentuk pendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan, akan tetapi sampai saat ini Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga yayasan pendidikan yang sangat besar di Indonesia. Dengan banyaknya jalur dakwah yang dimiliki oleh Muhammadiyah baik melalui sekolah, universitas, rumah sakit sampai pada kajian-kajian keagamaan menjadikan Muhammadiyah menjadi salah satu ormas yang mempunyai posisi yang sangat diperhitungkan oleh Negara dan pemerintah. Disisi lain NU sebagai induk mempunyai lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren yang cukup besar dan tersebar di beberapa wilayah, jadi bisa dikatakan bahwa kegiatan rutin NU adalah mengurus pendidikan.

Eksistensi NU dan Muhammadiyah

Sebagai organisasi massa berbasis keagamaan terbesar di Indonesia, ternyata NU dan Muhammadiyah mempunyai beberapa perbedaan mendasar, baik dalam pendekatan Teologis, perbedaan sumber daya dan infrastruktur yang mempengaruhi operasional organisasi tersebut serta relasi keduanya. Perbedaan tersebut mengakibatkan antara NU dan Muhammadiyah mempunyai garis pemisah yang jelas cenderung lebar dan berpengaruh dalam dinamika perkembangan kebangsaan maupun keagamaan. Posisi netral Muhammadiyah dan NU sebagai ormas Islam bisa dipahami sebagai *standing position* lembaga keagamaan yang berfokus terhadap kemaslahatan umat Islam. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia terbukti ikut memberi warna pada proses demokratisasi.

Secara normatif, Muhammadiyah menyatakan sebagai organisasi yang tidak berafiliasi dengan politik. Keterlibatan elite Muhammadiyah dalam proses politik bukanlah secara kelembagaan. Keterlibatan Muhammadiyah dalam praktik politik praktis sulit dihindari, karena politik memiliki daya tarik yang kuat seperti kekuasaan, kekayaan, popularitas, dan fasilitas keduniaan. Meskipun ormas Muhammadiyah tidak berpolitik, tetapi bukan berarti Muhammadiyah mengabaikan dunia politik. Berdirinya Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh semangat untuk melakukan kerja-kerja sosial, seperti pendidikan, kesehatan, menyantuni kaum *mustadl'afin* dan *tabligh* (Mulkhan Abdul Munir, 2001).

Muhammadiyah pada saat awal pendiriannya tidak memasuki wilayah politik praktis untuk memperoleh kekuasaan. Namun dalam perjalanannya, terjun ke dalam dunia politik menjadi sebuah keniscayaan, karena Muhammadiyah melakukan strategi untuk tetap *survive* dari waktu ke waktu.

NU sebagai *jam'iyah diniyyah* jauh sebelum NU lahir dalam bentuk organisasi, aktivitas sosial yang keagamaan yang dilakukan cukup kuat. Sikap-sikap normatif yang dimiliki NU mempengaruhi perspektifnya dalam melihat kehidupan politik kenegaraan (Fahry Ali dan Bachtiar Effendy, 1986). Relasi NU dan Muhammadiyah dalam sejarah Indonesia modern memang begitu menarik. Sepanjang perjalanan organisasi Islam terbesar ini sering kali diwarnai korporasi, kompetisi, bahkan konfrontasi. Muhammadiyah sering dianggap sebagai kaum 'modernis' dengan kebanyakan basis massanya adalah kaum terdidik (rasionalis), sedangkan NU sering dianggap sebagai kaum 'tradisional' karena masih sangat kental dengan unsur budaya lokal yang dibaurkan dengan agama.

Sepanjang perjalanan organisasi Islam terbesar ini sering kali diwarnai korporasi, kompetisi, bahkan konfrontasi. Muhammadiyah sering dianggap sebagai kaum 'modernis' dengan kebanyakan basis massanya adalah kaum terdidik (rasionalis), sedangkan NU sering dianggap sebagai kaum 'tradisional' karena masih sangat kental dengan unsur budaya lokal yang dibaurkan dengan agama.

Namun, proses demokratisasi yang berkembang dan menguatnya civil society belakangan ini menjadikan relasi NU dan Muhammadiyah menjadi cair. Sudah tidak berkutut dengan permasalahan ajaran mana yang benar dan menyalahkan ajaran lainnya, tapi cenderung saling memahami perbedaan satu dengan lainnya. Relasi ini kemudian tidak bisa dilepaskan dari dinamika partai politik yang bernaung pada dua ormas tersebut. PKB sebagai mesin politik dari NU dan PAN sebagai mesin politik Muhammadiyah meskipun saat ini relasi PAN dan Muhammadiyah secara nasional tidak lagi semurni awal reformasi tetapi dalam konteks lokal di Kota Salatiga masih cukup intim.

Kontestasi pemilihan Presiden tahun 2024 memberikan arena nyata bagi organisasi Muhammadiyah dan NU di Salatiga untuk mendapatkan eksistensi politik. Posisi Muhammadiyah yang masih memiliki hubungan yang sangat baik terhadap PAN yang merupakan bagian dari pengusung dalam Pilpres memberikan warna tersendiri. Upaya untuk melakukan aksi politik dilakukan dengan tidak membawa nama Muhammadiyah secara eksplisit. Tetapi memanfaatkan modal sosial dan ekonomi Muhammadiyah yang stabil dengan membuat kelompok/kendaraan yang mengakomodasi relawan seperti Angkatan Muda Muhammadiyah(AMM) yang digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Afiliasi PDM Salatiga sangat mesra terhadap PAN diperkuat oleh kader PDM Salatiga yang juga merupakan elite PAN kota Salatiga. Keunikan ini yang masih terjaga dan berbeda dengan daerah lain yang afiliasi Muhammadiyah dengan partai politik sudah terpecah. Meskipun budaya politik yang ada di Muhammadiyah tidak seperti NU akan tetapi upaya politik tetap dijalankan dalam proses kontestasi.

Sebaliknya, NU dalam kontestasi politik lebih eksplisit dalam memberikan respons politik pada kontestasi yang sedang berlangsung dengan modalitas sosial dan kultural. Kegiatan-kegiatan pengajian di berbagai pondok pesantren atau tempat lain yang memiliki basis NU yang kuat kerap dilaksanakan. Upaya politik terhadap dukungan ke paslon tertentu

disampaikan secara tersirat oleh para elite NU. Meskipun pada beberapa sisi NU tetap menjaga agar tetap tidak ikut dalam politik praktis yang sedang berlangsung. Tetapi budaya politik NU seperti *sami'na wa atho'na* masih sangat kuat mengakar pada pola pikir masyarakat yang berbasis NU. Sehingga kedekatan kultural ini bisa diasumsikan sebagai bagian dari dukungan politik terhadap pihak yang memiliki afiliasi yang sangat dekat terhadap NU.

Ringkasnya, kedua potensi di atas dikelola oleh NU dan Muhammadiyah tidak hanya sebagai caranya untuk memperkuat proses konsolidasi demokrasi sistem politik nasional dan tingkat lokal, namun juga merupakan cara yang NU dan Muhammadiyah lakukan untuk mengamankan kepentingan otonom organisasinya yang mewadahi jutaan jamaah dan kader yang tersebar di berbagai pelosok daerah atau kepentingan jamaah atau anggotanya di daerah.

KESIMPULAN

Keberadaan Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi *keummatan* dalam berbagai penyelenggaraan kontestasi politik, pengalaman pemilu serentak mengingatkan kembali pada pentingnya peran ormas bagi upaya memperkuat konsolidasi demokrasi. Dengan modalitas sosial, ekonomi, budaya dan simbolik yang dimiliki merupakan harapan besar di pundak kedua ormas tersebut untuk berperan sebagai tiang bagi tegaknya demokrasi politik yang disertai transparansi, dan akuntabilitas. Sehingga, keterlibatan NU dan Muhammadiyah dan sebagai *civil society* sejatinya adalah tiang harapan bagi masyarakat secara umum dan keberlangsungan konsolidasi demokrasi. Hal yang menjadi perlu diawasi bersama adalah bilamana modalitas sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik yang dipunyai kedua ormas tersebut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan dan tawar menawar jangka pendek atau tujuan pragmatis. Pada titik ini, konsolidasi organisasi sangat penting agar modalitas yang ada pada Muhammadiyah dan NU tidak hanya dilirik ketika ada hajatan politik, namun juga dalam fase mengawal berjalannya kekuasaan.

Dinamika relasi modalitas NU dan Muhammadiyah dalam konteks lokal tidak menampakkan fluktuasi yang berlebihan. Namun pola strategi yang dilakukan untuk mendapatkan eksistensi politik cukup unik, Muhammadiyah dalam melaksanakan upaya politik menggunakan identitas lain secara eksplisit dalam melakukan aktivitas politik praktisnya, sedangkan NU menggunakan cara tradisional dalam kegiatan keagamaan yang berlangsung di berbagai wilayah yang menjadi basis jamaah NU di Salatiga. NU dan Muhammadiyah adalah harapan umat yang tidak dapat dikesampingkan dari aspek masyarakat Islam pada umumnya. Kepentingan *keummatan* dapat diartikan sebagai pengejawantahan panggilan kebangsaan NU dan Muhammadiyah sebagai upaya memperkuat konsolidasi demokrasi. Pertimbangan yang didasari nilai kebaikan yang akan diperoleh akan lebih banyak dari *mudharatnya* kemudian. Di samping itu, kuatnya dorongan moral agar baik NU dan Muhammadiyah, berperan sebagai institusi sosial yang juga menjadi ruang publik bagi penguatan politik yang berbasis '*amar ma'ruf nahi munkar*' dan '*rahmatan lil alamin*'.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. Muhammadiyah. (1989). *The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation under Dutch Colonialism*. Gadjah Mada University Press.
- Asyari S. (2009). *Nalar Politik NU-Muhammadiyah; Overcrossing Java Sentris*. Lkis Pelangi Aksara.
- Baxter JA, C. WF. (1998). Doing Field Research: Practice and Meta-Theory in Counterpoint. *Journal of Management Accounting Research.*, 10(19), 69–87. <https://www.proquest.com/openview/e87e8e57b887a2e1de932b9851b6e3c3/1?pq-origsite=gscholar&cbl=31820>

- Bourdieu P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. In *The new social theory reader*. University of Cambridge.
- Bourdieu P. A. (1984). *social critique of the judgement of taste*. Traducido del francés por R. Nice. Londres. Routledge.
- Bush, R., Anwar, N., Marolt, P., Lysaght, T., Prematillak, T. M., Bunnell, T., & Yeo, V. (2014). A Snapshot of Muhammadiyah Social Change and Shifting Markers of Identity and Values. In *Asia Research Institute Working Paper Series* (Issue 221). <https://ari.nus.edu.sg/publications/wps-221-a-snapshot-of-muhammadiyah-social-change-and-shifting-markers-of-identity-and-values/>
- Efendi D. (2004). *Politik elite Muhammadiyah: studi tentang fragmentasi elite Muhammadiyah*. Reviva Cendikia.
- Fahry Ali dan Bachtiar Effendy. (1986). *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*. Mizan.
- Feillard A. (1999). *NU vis a vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Lkis Pelangi Aksara.
- Ilyas Y, A. M. L. M. (1993). *Muhammadiyah dan NU: reorientasi wawasan keIslaman. Kerjasama*. LPPI UMY, LKPSM NU, dan PP Al-Muhsin.
- Jenkins R. (2004). *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Kreasi Wacana.
- Jung, E. (2009). *Taking Care of The Faithful: Islamic Organization and Partisan Engagement in Indonesia*. University of Wisconsin-Madison.
- Jurdi S. (2004a). *Elite Muhammadiyah dan kekuasaan politik: Studi tentang tingkah laku politik elite lokal Muhammadiyah sesudah Orde Baru*. Gadjah Mada University Press.
- Jurdi S. (2011b). Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia 1966-2006. *Jurnal Tajdida*, 9(1), 127–132.
- Karim A.G. (1995). *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Mujani, S. and R. W. L. (2006). *asian survey*. University Of California Press.
- Mulkhan Abdul Munir. (2001). *Menggugat Muhammadiyah*. Fajar Pustaka.
- Ritzer, G. dan D. J. G. (2004). *Teori Sosiologi Modern Edisi VI*. Kencana.
- Sairin W. (1995). *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Subiyakto, R. (2011). KETERLIBATAN KIAI DALAM PILKADA (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006). *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 41–49.
- Sulistiyanto P. (2009). *Incumbent, Populism and the Decline of Royal Power. Deepening Democracy in Indonesia? : Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. ISEAS Publishing.

Thontowi, P. U. (2008). *Civil Society and Democratization: The Case of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Post-Soeharto Indonesia*. Department of Political Science University of Hawaii at Manoa.

Walidin W, S. T. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press.